E-ISSN: 2798-0413,P-ISSN :2798-0111
The journal is accredited "**Sinta 5**" by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022.

Implementasi Program Jambanisasi dalam Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat

Arno [1], Husni Mubaroq [2], Andhi Nur Rahmadi [3]

[1] Universitas Pancamarga Probolinggo, Indonesia; rezaarno91@gmail.com
[2] Universitas Pancamarga Probolinggo, Indonesia; Husni999fisip@upm.ac.id
[3] Universitas Pancamarga Probolinggo, Indonesia; andhi.iansyah@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science

Vol 7 No 2 November 2026
https://doi.org/10.54471/idarotuna.v7i2.219

Received: October 01, 2026
Accepted: October 25, 2026
Published: November 05, 2026

Publisher's Note: Program Study Office Adminstrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: Improving the community's quality of life depends heavily on environmental health, especially when basic sanitation is provided. The continued occurrence of open defecation in a number of rural locations suggests that public knowledge and access to adequate sanitation are still inadequate. This study uses a case study design and a qualitative methodology. Sumberbendo Village, Sumberasih District, Probolinggo Regency, was the site of the study. Interviews, observation, and documentation were all part of the data collection process. The Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing/verification, was used for data analysis. Source and technique triangulation was used to guarantee data veracity. The Latrine Construction Program in Sumberbendo Village was carried out in phases that included data collecting, outreach, sanitary latrine construction, and post-implementation monitoring and assistance, according to research findings. Effective communication, the dedication of local leaders, the availability of sufficient resources, and efficient bureaucratic coordination all contributed to the program's effectiveness. Positive effects of the program include a decrease in open defecation, a rise in the usage of sanitary latrines, and an increase in community understanding of the value of clean, healthy living practices and sanitation. Thus, by combining the creation of sanitary infrastructure with long-term behavioral changes in the community, the Latrine Construction Program can be regarded as highly successful in enhancing environmental health in Sumberbendo Village.

Keywords: *Policy Implementation, Latrine Provision, Sanitation, Environmental Health, Community Participation.*

Pendahuluan

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu determinan utama dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang optimal, khususnya di wilayah pedesaan (Kisra, K et al. 2024). Kondisi lingkungan yang sehat berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit yang bersumber dari lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pencernaan. Salah satu indikator utama kesehatan lingkungan adalah tersedianya sanitasi dasar yang layak, terutama kepemilikan dan pemanfaatan jamban sehat oleh masyarakat (Ginting et al., 2024). Namun demikian, hingga saat ini masih dijumpai praktik buang air besar sembarangan (BABS) di sejumlah wilayah pedesaan, yang mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungan.

Implementasi jambanisasi di Kabupaten Probolinggo juga diwujudkan melalui kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang dilaksanakan oleh Kodim Probolinggo. Upaya ini diperkuat oleh peran Forum Kabupaten Probolinggo Sehat (FKPS) yang secara aktif melakukan sosialisasi pencapaian Open Defecation Free (ODF) 100 persen serta kegiatan serah terima jamban sehat kepada masyarakat. Rangkaian program dan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa jambanisasi di Kabupaten Probolinggo tidak hanya bersifat pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku sebagai fondasi keberlanjutan kesehatan lingkungan.

Desa Sumberbendo yang terletak di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program jambanisasi melalui bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Probolinggo. Program ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan mendukung perbaikan kesehatan lingkungan di tingkat desa. Penetapan Desa Sumberbendo sebagai lokasi program didasarkan pada kondisi kebutuhan sanitasi masyarakat yang masih memerlukan intervensi kebijakan, khususnya dalam penyediaan sarana jamban sehat bagi rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, penerimaan dan pemanfaatan fasilitas jamban oleh masyarakat Desa Sumberbendo tidak terlepas dari karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, kebiasaan yang telah mengakar, serta pola interaksi sosial masyarakat berpengaruh terhadap respons masyarakat terhadap program jambanisasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kontekstual dan mendalam mengenai bagaimana program tersebut diimplementasikan di tingkat desa serta bagaimana masyarakat memaknai, menerima, dan memanfaatkan fasilitas jamban yang disediakan. Pemahaman ini menjadi penting untuk menilai efektivitas program sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat desa.

Penelitian ini menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan program jambanisasi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam praktiknya, berbagai faktor seperti kesiapan aparatur desa, mekanisme penyaluran bantuan, serta partisipasi masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan program. Tanpa adanya kajian empiris yang sistematis, potensi ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dan implementasi di tingkat lokal sulit diidentifikasi secara objektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada implementasi program jambanisasi sebagai sebuah proses kebijakan, bukan semata-mata sebagai hasil pembangunan fisik. Penelitian ini mengintegrasikan aspek kesehatan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan konteks sosial desa dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan mengangkat studi empiris di Desa Sumberbendo, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis serta menjadi rujukan bagi pengembangan dan perbaikan program jambanisasi di desa lain dengan karakteristik serupa.

Kebaruan pertama penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif implementasi kebijakan dalam menganalisis Program Jambanisasi di tingkat desa. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengukur keberhasilan program berdasarkan indikator kuantitatif, seperti jumlah jamban yang dibangun, cakupan akses sanitasi, atau penurunan praktik buang air besar sembarangan. Penelitian ini justru memusatkan perhatian pada bagaimana

kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah desa melalui proses komunikasi, koordinasi antarlembaga, pengelolaan sumber daya, serta respons masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sanitasi di tingkat lokal (Damschroder et al., 2022).

Kebaruan kedua terletak pada integrasi perspektif kesehatan lingkungan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan desa (village governance). Penelitian mengenai sanitasi umumnya dikaji dari sudut pandang kesehatan masyarakat atau teknik lingkungan, sedangkan penelitian ini memandang Program Jambanisasi sebagai bagian dari tata kelola pembangunan desa yang melibatkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis mengenai bagaimana kapasitas kelembagaan pemerintah desa memengaruhi efektivitas implementasi program kesehatan lingkungan secara berkelanjutan (World Health Organization, 2023; United Nations Development Programme, 2024).

Kebaruan ketiga adalah penempatan partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai indikator keberhasilan program, tetapi sebagai elemen yang membentuk proses implementasi kebijakan. Penelitian ini menganalisis bagaimana masyarakat berperan sejak tahap identifikasi penerima manfaat, sosialisasi, pelaksanaan pembangunan jamban, hingga pemanfaatan dan pemeliharaan sarana sanitasi. Pendekatan ini menghasilkan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas kajian implementasi program sanitasi yang selama ini lebih berorientasi pada aspek infrastruktur dibandingkan dinamika sosial masyarakat (UNICEF, 2023; World Bank, 2023).

Kebaruan berikutnya terletak pada pemilihan lokasi penelitian di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, yang memiliki karakteristik sosial pedesaan dengan beragam kondisi ekonomi masyarakat dan tantangan sanitasi yang masih nyata. Konteks lokal tersebut memberikan ruang untuk mengidentifikasi berbagai faktor implementasi yang tidak selalu ditemukan pada penelitian di wilayah perkotaan atau daerah

dengan tingkat akses sanitasi yang lebih baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menghasilkan pengetahuan kontekstual (context-specific knowledge) yang dapat menjadi model implementasi Program Jambanisasi bagi desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa di Indonesia (United Nations, 2024; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program jambanisasi. Temuan penelitian ini berpotensi menjadi dasar rekomendasi dalam perumusan strategi sanitasi berbasis masyarakat yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan karakteristik masyarakat setempat, penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya implementasi kebijakan sanitasi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perubahan perilaku dan peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Jambanisasi serta dinamika sosial yang menyertainya di tingkat desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada penggalian makna, persepsi, pengalaman, dan praktik sosial masyarakat serta aparatur desa dalam pelaksanaan program jambanisasi sebagai kebijakan publik di bidang kesehatan lingkungan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Angga Dwi Reza Saputra (Kepala Desa), Rudiyanto (Kasun Cirian), Nurhadi (Kasi Pemerintahan), Samsul Arifin (Kasi Pembangunan) dan Yudi (Kaur Umum) yang membidangi pembangunan atau kesehatan lingkungan, serta Indah Hayati, Susiana (Pengawas), Mustofa (Bendahara). Mereka dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program jambanisasi di

tingkat desa, sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan tersebut (Hardani et al., 2020).

Selain itu, sumber data primer juga berasal dari masyarakat penerima manfaat program jambanisasi, khususnya kepala keluarga yang telah memperoleh bantuan pembangunan jamban: B. Janten, B. Munanti, dan Bebun. Masyarakat dipilih sebagai sumber data karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak program, baik dari sisi perubahan perilaku, pemanfaatan fasilitas jamban, maupun perbaikan kondisi kesehatan lingkungan. Informasi dari masyarakat penting untuk menggambarkan tingkat penerimaan, partisipasi, serta hambatan sosial dan budaya dalam penggunaan jamban sehat di lingkungan desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif, mendalam, serta saling melengkapi, sehingga mampu menggambarkan secara utuh proses implementasi Program Jambanisasi dalam peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat Desa Sumberbendo.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo berlangsung melalui proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sasaran. Sosialisasi yang dilaksanakan melalui pertemuan warga, kegiatan kesehatan masyarakat, dan forum desa menjadi sarana penyampaian informasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme program. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi berperan penting dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak. Dalam perspektif implementasi kebijakan, komunikasi yang jelas dan konsisten akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program yang dijalankan (Damschroder et al., 2022).

Implementasi Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program ditentukan oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi diwujudkan melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat melalui berbagai forum, seperti pertemuan warga, posyandu, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Informasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jamban sehat, tetapi juga menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta bahaya praktik buang air besar sembarangan. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh keterlibatan pemerintah desa, perangkat desa, tenaga kesehatan, serta ketersediaan sarana dan anggaran, meskipun masih terdapat keterbatasan dana sehingga pelaksanaan bantuan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Sementara itu, disposisi pelaksana tercermin dari komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan pendataan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan program. Di sisi lain, struktur birokrasi terlihat melalui mekanisme pelaksanaan yang sistematis, mulai dari pendataan calon penerima manfaat, verifikasi, pengusulan bantuan, pembangunan jamban, hingga monitoring pascapelaksanaan yang dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait. Secara keseluruhan, data lapangan menunjukkan bahwa keempat komponen implementasi kebijakan tersebut saling mendukung sehingga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan jamban sehat, meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga sanitasi lingkungan, serta berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan permukiman yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari praktik buang air besar sembarangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi juga menempatkan perubahan perilaku masyarakat sebagai tujuan utama program. Hal ini terlihat dari adanya keterpaduan antara penyampaian informasi kepada masyarakat, penyediaan sumber daya yang tersedia, komitmen pelaksana dalam melakukan pendampingan, serta mekanisme pelaksanaan yang berjalan secara sistematis. Meskipun pelaksanaan program menghadapi keterbatasan anggaran sehingga bantuan diberikan secara bertahap, kondisi tersebut tidak mengurangi upaya pemerintah desa untuk memastikan setiap tahapan program tetap terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian,

implementasi program menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada tersedianya bantuan fisik, tetapi juga pada konsistensi pelaksana dalam mengawal seluruh proses pelaksanaan.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa komunikasi yang berkelanjutan berkontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan sanitasi yang aman. Edukasi yang dilakukan secara berulang melalui kader kesehatan, perangkat desa, dan forum masyarakat mampu meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya penggunaan jamban sehat sebagai upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Kondisi ini sejalan dengan pendekatan perubahan perilaku dalam program sanitasi yang menekankan bahwa keberhasilan intervensi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh proses komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara konsisten sehingga tercipta perubahan perilaku yang berkelanjutan (United Nations Children's Fund, 2025).

Keberhasilan komunikasi dalam implementasi Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo juga menunjukkan bahwa dimensi komunikasi tidak dapat dipisahkan dari karakteristik sosial masyarakat desa. Masyarakat cenderung lebih mudah menerima informasi apabila disampaikan melalui aktor yang memiliki legitimasi sosial, seperti kepala desa, perangkat desa, kader kesehatan, maupun tokoh masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kredibilitas komunikator yang menyampaikan pesan tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyampai informasi, semakin besar pula peluang masyarakat untuk menerima dan mengadopsi perilaku sanitasi yang dianjurkan. Dengan demikian, komunikasi berbasis jejaring sosial lokal menjadi modal penting dalam mempercepat pencapaian tujuan Program Jambanisasi (UNICEF, 2025).

Lebih lanjut, hasil penelitian mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlangsung secara intensif mampu mengurangi resistensi masyarakat terhadap perubahan perilaku sanitasi. Pada tahap awal pelaksanaan program masih terdapat sebagian masyarakat yang

menganggap pembangunan jamban bukan merupakan kebutuhan mendesak karena telah terbiasa melakukan praktik buang air besar sembarangan. Namun, melalui proses sosialisasi yang dilakukan secara berulang dengan pendekatan persuasif dan edukatif, persepsi tersebut mulai mengalami perubahan. Masyarakat semakin memahami hubungan antara sanitasi yang buruk dengan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, infeksi saluran pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan perilaku memerlukan proses komunikasi yang berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan penyediaan sarana fisik semata (WHO, 2025).

Analisis temuan juga menunjukkan bahwa komunikasi dalam Program Jambanisasi berfungsi sebagai media pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Proses dialog yang dilakukan selama sosialisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam penentuan penerima manfaat maupun penyelesaian berbagai kendala selama implementasi program. Keterlibatan masyarakat tersebut menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi aktor yang turut menjaga keberlanjutan penggunaan jamban sehat. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berlangsung secara inklusif dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan sanitasi berkelanjutan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa komunikasi yang berlangsung secara dua arah memungkinkan pemerintah desa memperoleh berbagai masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program Jambanisasi. Berbagai aspirasi yang disampaikan, seperti keterbatasan kemampuan ekonomi, kondisi geografis, maupun kebutuhan teknis pembangunan jamban, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pelaksanaan program. Dengan adanya mekanisme umpan balik (feedback), pemerintah desa dapat menyesuaikan kebijakan dan langkah-langkah implementasi agar lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sehingga potensi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program Jambanisasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun partisipasi, meningkatkan kepercayaan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan keberlanjutan program. Semakin efektif komunikasi yang dibangun antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan program, yaitu meningkatnya akses terhadap sanitasi layak, berubahnya perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat, serta terwujudnya lingkungan desa yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi perlu didukung oleh konsistensi penyampaian informasi antar pelaksana program. Keseragaman informasi mengenai persyaratan penerima bantuan, prosedur pembangunan jamban, hingga pemanfaatan fasilitas sanitasi menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman di tingkat masyarakat. Apabila terdapat perbedaan informasi yang disampaikan oleh aparat desa, kader kesehatan, maupun pihak terkait lainnya, maka dapat memunculkan persepsi negatif yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program. Oleh karena itu, koordinasi internal antar pelaksana menjadi bagian integral dari strategi implementasi kebijakan agar seluruh aktor mampu menyampaikan pesan yang konsisten dan terintegrasi sesuai dengan tujuan peningkatan akses sanitasi aman (WHO, 2025)

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menguatkan bahwa komunikasi merupakan fondasi utama dalam keberhasilan implementasi Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat jamban sehat, tetapi juga mendorong terbentuknya perubahan perilaku yang mendukung peningkatan kesehatan lingkungan. Dengan meningkatnya penggunaan jamban sehat, kualitas sanitasi lingkungan desa menjadi lebih baik sehingga risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit berbasis sanitasi dapat ditekan. Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa

keberhasilan program sanitasi tidak cukup diukur dari jumlah jamban yang dibangun, tetapi juga dari keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara fasilitas sanitasi tersebut sebagai bagian dari pembangunan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan (WHO, 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan komunikasi yang bersifat partisipatif mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap Program Jambanisasi. Selama kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, mengemukakan kendala yang dihadapi, serta memberikan masukan terkait pelaksanaan program. Pola komunikasi dua arah tersebut menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang muncul selama implementasi dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan pesan kebijakan, tetapi juga membangun dialog yang konstruktif.

Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader kesehatan dalam proses sosialisasi turut memperkuat efektivitas komunikasi kebijakan. Keberadaan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat membuat pesan mengenai pentingnya penggunaan jamban sehat lebih mudah diterima karena disampaikan oleh figur yang dipercaya. Dukungan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan sanitasi tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah desa, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus memperkuat legitimasi program.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi Program Jambanisasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Komunikasi yang jelas, konsisten, partisipatif, dan berorientasi pada edukasi mampu meningkatkan pemahaman, mengubah perilaku masyarakat, memperkuat kepercayaan kepada pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi media penyampaian kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial

yang mendukung terwujudnya sanitasi layak, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan kesehatan lingkungan di Desa Sumberbendo.

Dari aspek sumber daya, penelitian menemukan bahwa keberhasilan Program Jambanisasi didukung oleh tersedianya bantuan pembangunan jamban, dukungan aparatur desa, serta keterlibatan instansi terkait. Namun demikian, data penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan anggaran sehingga program belum dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting yang menentukan luas cakupan implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Damschroder et al. (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya yang adaptif berkontribusi terhadap keberlangsungan implementasi Program Jambanisasi. Meskipun bantuan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam waktu yang bersamaan, pelaksanaan program tetap berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Pendekatan bertahap tersebut mencerminkan adanya perencanaan yang realistis sekaligus komitmen pemerintah desa dalam memperluas akses sanitasi layak secara berkelanjutan. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya tidak menjadi penghalang utama bagi implementasi kebijakan, melainkan menjadi tantangan yang dikelola melalui strategi prioritas, kolaborasi, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien sehingga tujuan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat tetap dapat diwujudkan.

Dari sisi disposisi pelaksana, penelitian menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa dalam menjalankan Program Jambanisasi. Kepala desa, perangkat desa, dan unsur pendukung lainnya secara aktif melakukan pendataan, sosialisasi, pengawasan, serta monitoring penggunaan jamban. Sikap proaktif tersebut menunjukkan adanya kesungguhan pelaksana dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi pelaksana yang positif menjadi faktor penting dalam

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan karena mencerminkan tingkat tanggung jawab dan komitmen terhadap program (Damschroder et al., 2022).

Koordinasi yang terbangun juga memperlihatkan bahwa implementasi Program Jambanisasi merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama, sementara tokoh masyarakat berfungsi sebagai penghubung sosial yang membantu membangun penerimaan masyarakat terhadap program. Kolaborasi tersebut memperkuat legitimasi program di tingkat masyarakat dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku sanitasi.

Dalam perspektif kesehatan lingkungan, temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan permukiman setelah pelaksanaan Program Jambanisasi. Hasil observasi memperlihatkan berkurangnya praktik buang air besar sembarangan serta meningkatnya penggunaan fasilitas sanitasi yang layak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan yang berpotensi mengurangi risiko pencemaran tanah dan sumber air. Temuan ini sejalan dengan pandangan World Health Organization dan UNICEF (2023) yang menegaskan bahwa akses terhadap sanitasi layak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat.

Perbaikan kondisi sanitasi yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa Program Jambanisasi berfungsi sebagai intervensi kesehatan lingkungan yang bersifat preventif. Penyediaan jamban sehat memungkinkan pengelolaan limbah manusia dilakukan secara lebih aman sehingga dapat mengurangi potensi penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Dengan demikian, implementasi program tidak hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pencegahan masalah kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2019).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa jambanisasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembangunan infrastruktur sanitasi. Program ini merupakan bagian dari upaya perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat. Data wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan buang air besar di sungai dan beralih menggunakan jamban sehat yang tersedia di rumah masing-masing.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa program telah berhasil mendorong transformasi perilaku sanitasi masyarakat sebagaimana tujuan utama program jambanisasi (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Dari perspektif Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), perubahan penggunaan jamban menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dalam menjaga kesehatan keluarga. Masyarakat tidak hanya memanfaatkan jamban untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mulai membiasakan anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk menerapkan perilaku sanitasi yang lebih baik. Temuan ini mendukung pandangan Green dan Kreuter (2005) bahwa perubahan perilaku kesehatan dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan peningkatan kesadaran individu terhadap manfaat perilaku sehat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Jambanisasi. Partisipasi terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas jamban yang telah dibangun. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan Cohen dan Uphoff (2022), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan jamban sehat. Kebiasaan lama yang sebelumnya menganggap buang air besar di sungai sebagai praktik yang biasa perlahan mulai berubah setelah adanya sosialisasi dan dukungan tokoh masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi perilaku sanitasi memerlukan pendekatan sosial yang mempertimbangkan nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat (Rifai & Anwar, 2019).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Jambanisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bantuan fisik berupa jamban, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Berdasarkan data wawancara, masyarakat yang sebelumnya kurang memperhatikan aspek sanitasi mulai memahami hubungan antara kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah menyentuh aspek kognitif masyarakat, yaitu peningkatan pengetahuan sebagai dasar perubahan perilaku. Menurut Damschroder et al. (2022), keberhasilan implementasi suatu program sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menciptakan pemahaman yang sama mengenai tujuan program kepada kelompok sasaran.

Dari sudut pandang implementasi kebijakan, proses pendataan calon penerima manfaat yang dilakukan pemerintah desa menunjukkan adanya upaya untuk memastikan ketepatan sasaran program. Pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam proses implementasi karena menentukan siapa yang berhak menerima manfaat program. Ketepatan sasaran merupakan indikator penting dalam efektivitas kebijakan publik karena berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan program. Temuan ini sejalan dengan pendapat Dunn (2018) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan mekanisme operasional yang mampu menghubungkan tujuan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Program Jambanisasi. Tokoh masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima informasi dari pemerintah desa, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga. Kehadiran tokoh masyarakat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program sehingga proses penerimaan kebijakan berlangsung lebih mudah. Dalam perspektif pembangunan masyarakat, dukungan tokoh lokal sering kali menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi sosial suatu program pembangunan.

Keberhasilan implementasi Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo juga memperlihatkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan kesehatan lingkungan. Data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi mulai terlibat dalam pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Bentuk keterlibatan tersebut menunjukkan adanya transformasi dari posisi masyarakat sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Cohen dan Uphoff (2022) menjelaskan bahwa

partisipasi masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan program karena mencerminkan tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi, penggunaan jamban sehat secara konsisten oleh masyarakat menunjukkan bahwa program telah menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat praktis. Perubahan tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas buang air besar di sungai maupun area terbuka. Dalam perspektif PHBS, perubahan perilaku ini menunjukkan adanya proses internalisasi nilai kesehatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Green dan Kreuter (2005) menjelaskan bahwa perilaku kesehatan yang berkelanjutan umumnya terbentuk melalui kombinasi antara pengetahuan, kesadaran, pengalaman, dan dukungan lingkungan sosial.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan jamban sehat memberikan dampak psikologis bagi masyarakat penerima manfaat. Masyarakat merasa lebih nyaman, aman, dan memiliki privasi yang lebih baik dibandingkan sebelum memperoleh fasilitas jamban. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga berkaitan dengan aspek kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. World Health Organization (2019) menegaskan bahwa sanitasi yang layak merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia karena berhubungan dengan martabat, keamanan, dan kualitas hidup.

Selain faktor pendukung, penelitian menemukan adanya hambatan berupa kebiasaan lama masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu cukup panjang. Kebiasaan buang air besar di sungai merupakan praktik yang telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat sebelum program dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku kesehatan tidak dapat terjadi secara instan. World Health Organization (2010) menjelaskan bahwa perubahan perilaku memerlukan proses adaptasi yang melibatkan perubahan pengetahuan, sikap, dan norma sosial dalam masyarakat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Program Jambanisasi memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Keberadaan jamban sehat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih,

meningkatkan kualitas sanitasi rumah tangga, serta memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan manfaat pada tingkat individu, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesehatan lingkungan secara kolektif. Temuan ini sesuai dengan tujuan STBM yang menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat sebagai dasar pembangunan sanitasi berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Secara konseptual, hasil penelitian memperlihatkan adanya keterkaitan antara implementasi kebijakan, perubahan perilaku, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi kelembagaan yang baik berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam penggunaan jamban sehat. Partisipasi tersebut kemudian menghasilkan perubahan perilaku sanitasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat Desa Sumberbendo. Dengan demikian, implementasi Program Jambanisasi dapat dipahami sebagai proses pembangunan sosial yang tidak hanya menghasilkan infrastruktur sanitasi, tetapi juga membentuk budaya hidup sehat yang berkelanjutan.Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo berjalan melalui komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya yang memadai meskipun terbatas, komitmen pelaksana yang tinggi, serta koordinasi antaraktor yang baik. Implementasi tersebut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, perubahan perilaku sanitasi, serta perbaikan kondisi kesehatan lingkungan. Dengan demikian, Program Jambanisasi tidak hanya berhasil menyediakan sarana sanitasi yang layak, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya hidup bersih dan sehat yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Jambanisasi dalam peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa Program Jambanisasi telah diimplementasikan melalui serangkaian tahapan yang meliputi pendataan penerima

manfaat, sosialisasi program, pembangunan fasilitas jamban sehat, serta monitoring dan pendampingan pascapelaksanaan. Implementasi program melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan sanitasi di tingkat desa.

Dari aspek komunikasi, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan pentingnya penggunaan jamban sehat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Komunikasi yang dilakukan melalui pertemuan warga dan kegiatan penyuluhan kesehatan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak sanitasi terhadap kesehatan keluarga dan lingkungan. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan Program Jambanisasi didukung oleh ketersediaan bantuan pembangunan jamban, dukungan aparatur desa, serta koordinasi dengan pihak terkait.

Dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antara pemerintah desa, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat berjalan dengan baik. Pola kerja yang terintegrasi tersebut mempermudah pelaksanaan program serta memperkuat dukungan sosial masyarakat terhadap penggunaan jamban sehat secara berkelanjutan.

Implementasi Program Jambanisasi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan praktik buang air besar sembarangan, meningkatnya penggunaan jamban sehat, serta terciptanya lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat. Selain itu, program turut mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat melalui peningkatan kesadaran sanitasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, implementasi Program Jambanisasi di Desa Sumberbendo dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif dalam mendukung peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat. Keberhasilan program tidak hanya ditunjukkan oleh tersedianya sarana sanitasi yang layak, tetapi juga oleh perubahan perilaku masyarakat serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Referensi

Achmadi, U. F. (2013). *Kesehatan masyarakat: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.

Chand, S. P. (2026). Methods of data collection in qualitative research: Interviews, focus groups, observations, and document analysis. *Advances in Educational Research and Evaluation, 6*(1), 303–317. https://doi.org/10.25082/aere.2026.01.001

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (2022). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development, 8*(3), 213–235. https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Science, 17*(1), 75.

Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). *The updated Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR): Constructs for advancing implementation science*. *Implementation Science, 17*(1), 75. https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Edward, G. C. III. (2022). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.

Firdausi, J., & Muhsin, I. (2024). The integration of Islam and local culture in Okol tradition in Madura. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam, 22*(1), 15–27. https://doi.org/10.30762/realita.v22i1.290

Ginting, E. A., Perwirawati, E., & Manik, V. (2024). Strategi komunikasi pemasaran pengelola penginapan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Puncak Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 77–91. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4136

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.

Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and practice*. Sage Publications.

Ismail, M. R., Ardianti, I. M., Oktarina, D., & Pawhestri, S. W. (2024). Sustainability analysis of beneficiaries of the latrine program assistance in Pekon Negeri Ratu Ngambur. *Organisms: Journal of Biosciences, 4*(2), 101–109.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Profil kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.

Kisra, K., Alamsyah, T., Kiswanto, K., Murdani, I., & Wintah, W. (2024). Implementation total sanitation based on first community-based pillar at public. *An Idea Health Journal, 4*(3), 122–128.

Laelasari, E., Serihati, A. Y. T., Triana, D., Hadidjah, K., Januariana, N. E., Alchamdani, Lestari, V., Arif, A., Widyasari, N. L., Haryawan, I. G. A., & Tandirerung, W. Y. (2025). *Kesehatan lingkungan*. Medsan Publisher.

Magister Ilmu Lingkungan. (2024). *Kajian kualitas lingkungan dan program STBM di Desa Karangsambung*. *Buletin Keslingmas*.

Mallongi, A. (2025). *Sanitasi dan hygiene lingkungan*. Gosyen Publishing.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2015). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. 39). Remaja Rosdakarya.

Notoatmodjo, S. (2014a). *Ilmu kesehatan masyarakat: Prinsip-prinsip dasar*. Rineka Cipta.

Notoatmodjo, S. (2014b). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.

Rifai, A., & Anwar, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 15*(2), 123–134.

Rifai, A., & Anwar, M. (2019). *Perubahan perilaku kesehatan masyarakat berbasis lingkungan*. Rajawali Pers.

Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy* (2nd ed.). Dorsey Press.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syafniaty, U. P., Ginting, C. N., & Nasution, S. A. (2024). Evaluation of community-based total sanitation program towards open defecation free village in Kerinci Regency. *ICOLIFEMED, 1*(1).

World Health Organization, & UNICEF. (2023). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022*. WHO & UNICEF Joint Monitoring Programme.

World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2025). *Steps to achieve universal access to safely managed sanitation*. WHO & UNICEF.

World Health Organization. (2010). *A conceptual framework for action on the social determinants of health*. World Health Organization.

World Health Organization. (2017). *Guidelines on sanitation and health*. World Health Organization.

World Health Organization. (2019). *Drinking-water*. World Health Organization.

World Health Organization. (2019). *Environmental health*. World Health Organization.

Yustina, I. (2024). Elimination of open defecation through community-led total sanitation. *IRJMS*.